

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Dampak

Soekanto (2005) menyatakan bahwa dampak secara etimologis berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*. Sedangkan, Suharno & Retnoningsih (2010) menyatakan bahwa dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak dibagi kedalam 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Dampak Positif, dimana dampak ini adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi, atau memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya dengan memperhatikan hal-hal yang baik dan positif;
2. Dampak Negatif, dimana dampak ini merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat buruk. Dampak negatif juga merupakan keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi, atau memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti

menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan.

Hosio (2007) mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis dampak secara umum, diantaranya :

1. Dampak primer merupakan pengaruh yang terjadi pada objek yang terkena dampak secara langsung.
2. Dampak sekunder merupakan pengaruh yang terjadi pada objek yang terkena dampak secara tidak langsung.

Kemudian, Kerap (1998) juga berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) jenis dampak secara umum, diantaranya :

1. Dampak langsung merupakan pengaruh yang terjadi secara langsung pada saat itu juga.
2. Dampak tidak langsung merupakan pengaruh yang terjadi tidak pada saat itu juga, tetapi membutuhkan waktu.

Sedangkan, Munasinghe (1992) berpendapat bahwa dampak terdiri dari 4 (empat) jenis, diantaranya :

1. Dampak ekonomi merupakan pengaruh yang terjadi pada aspek ekonomi.
2. Dampak sosial merupakan pengaruh yang terjadi pada aspek sosial.
3. Dampak budaya merupakan pengaruh yang terjadi pada aspek budaya.
4. Dampak lingkungan merupakan pengaruh yang terjadi pada aspek lingkungan.

Dari beberapa pernyataan diatas, dampak muncul karena adanya suatu peristiwa atau tindakan yang menghasilkan perubahan. Perubahan ini dapat positif

maupun negatif, langsung maupun tidak langsung dan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya.

The World Bank (2022) menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi dampak antara lain :

1. Karakteristik peristiwa atau tindakan yang dilihat berdasarkan skala, durasi, dan intensitas. Jika semakin besar skala peristiwa atau Tindakan maka semakin besar pula dampaknya, semakin lama durasi peristiwa atau Tindakan maka semakin besar pula dampaknya, begitu juga dengan semakin intens peristiwa atau Tindakan maka semakin besar pula dampaknya.
2. Karakteristik konteks yang dilihat dari faktor kerentanan dan kapasitas adaptasi. Dimana, semakin rentan suatu komunitas atau wilayah maka semakin besar pula dampaknya dan semakin tinggi kapasitas adaptasi suatu komunitas atau wilayah maka semakin kecil pula dampaknya.
3. Faktor lainnya seperti keberuntungan dan kebijakan Pemerintah. Dimana, faktor keberuntungan dapat memainkan peran dalam menentukan dampak suatu peristiwa atau tindakan. Begitu juga dengan kebijakan Pemerintah yang juga dapat mempengaruhi dampak suatu peristiwa atau tindakan.

The World Bank (2022) menyatakan bahwa terdapat strategi dalam mengatasi dampak, antara lain :

1. Mitigasi, dengan mengurangi risiko dan dampak suatu peristiwa atau tindakan.
2. Adaptasi, dengan menyesuaikan diri dengan dampak suatu peristiwa atau tindakan.

3. Pemulihan, dengan membangun kembali dan memulihkan kondisi setelah suatu peristiwa atau tindakan.

Untuk mengatasi dampak *The World Bank* (2022), terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti :

1. Identifikasi dampak yang ingin diatasi. Dampak ini bisa positif maupun negatif, dan dapat terjadi pada berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya.
2. Analisis penyebab dampak. Setelah dampak diidentifikasi, penting untuk menganalisis penyebabnya. Hal ini dapat membantu dalam menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi dampak tersebut.
3. Kembangkan solusi. Berdasarkan hasil analisis, kembangkan solusi yang tepat untuk mengatasi dampak. Solusi ini haruslah efektif, efisien, dan berkelanjutan.
4. Implementasi solusi. Setelah solusi dipilih, langkah selanjutnya adalah implementasinya. Implementasi solusi harus dilakukan dengan tepat dan terukur agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.
5. Evaluasi dan monitor. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dan monitor terhadap solusi yang telah diimplementasikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif dalam mengatasi dampak dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.

Selain itu, Mitchel (2015) menyatakan bahwa strategi mengatasi dampak dapat dilakukan melalui pendekatan proaktif diantaranya :

1. Analisis resiko. Dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko potensial untuk memami dampak yang mungkin terjadi.

2. Perencanaan kontingensi. Dibuat sebuah rencana untuk mengantisipasi dan dan menangani berbagai kemungkinan dampak.
3. Melakukan pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak.

Sedangkan, Ostrom (2009) juga menyatakan bahwa strategi dampak dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif diantaranya :

1. Keterlibatan pemangku kepentingan yang terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan.
2. Komunikasi terbuka terkait dampak dan strategi penanggulangannya.
3. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi dampak secara bersama-sama.

2.2.2 Dampak Desa Wisata

Desa wisata adalah “suatu wilayah pedesaan yang memiliki ciri khas, keunikan, dan daya tarik wisata yang dikemas sebagai suatu produk wisata yang mampu memberikan pengalaman wisata yang menarik bagi wisatawan” (Yoeti, 2007).

Terdapat beberapa dampak dengan terjadinya kegiatan pariwisata, diantaranya :

Desa wisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur, terutama dampak terhadap masyarakat lokal. Dampak desa wisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah 1) Dampak terhadap ekonomi, 2) Dampak terhadap sosial budaya, dan 3) Dampak terhadap lingkungan (Pitana & Gayatri, 2005).

Sukadijo (1997) menyebutkan bahwa dampak ekonomi dalam pembangunan pariwisata adalah dampak negatif atau dampak positif yang terjadi terhadap lingkungan ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya :

1. Perubahan Pekerjaan, merupakan perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Hal ini dapat terjadi dalam penerapan desa wisata, dimana perubahan pekerjaan ini dapat mendorong masyarakat yang semula bermata pencaharian di sektor tradisional (pertanian dan peternakan) beralih ke sektor pariwisata.
2. Pendapatan Masyarakat, merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam kurun waktu tertentu, biasanya bulanan atau tahunan. Dengan adanya desa wisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang semula didapatkan dalam kurun waktu bulanan atau tahunan kini bisa mereka dapatkan dalam kurun waktu harian melalui penjualan produk wisata seperti tiket masuk, souvenir, dan kuliner, penyewaan lahan atau bangunan, jasa transportasi, penampilan seni dan budaya, dan sebagainya.
3. Pola Pembagian Kerja, pola pembagian kerja dalam desa wisata umumnya berdasarkan kesepakatan bersama antar masyarakat desa dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun pembagian kerja ini berdasarkan
 - a. Berdasarkan Keterampilan, masyarakat dengan keterampilan khusus, seperti memasak, menari, atau memandu wisata, akan bertugas di bidang tersebut.
 - b. Berdasarkan *Gender*, seorang pria bekerja di bidang yang membutuhkan fisik kuat, seperti pembangunan infrastruktur, keamanan, dan transportasi.

Sedangkan, wanita bekerja di bidang yang membutuhkan ketelatenan dan interaksi, seperti pengelolaan *homestay*, penjualan *souvenir*, dan penyajian kuliner.

- c. Berdasarkan Kelompok, masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti kelompok kebersihan, kelompok keamanan, dan kelompok kuliner. Setiap kelompok bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Kesempatan kerja, merupakan peluang bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan minatnya. Dengan adanya desa wisata, mereka memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan baru seperti menjadi pembantu pendamping wisata, petugas kebersihan, staf hotel dan restoran, penjual souvenir, seniman dan pengrajin, sopir, dan masih banyak lagi.

Putu, G. N., Sukawati & Suarna (2009) menyatakan bahwa desa wisata berdampak positif terhadap :

1. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat, merupakan sebuah fenomena di mana terjadi peningkatan atau penurunan pendapatan rata-rata masyarakat di suatu desa wisata. Fitroh (2019) berpendapat bahwa perubahan tingkat pendapatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti penghasilan yang diterima per bulan, pekerjaan, beban keluarga yang ditanggung, pengeluaran, dan pola konsumsi dari masyarakat.
2. Terciptanya kesempatan kerja, merupakan sebuah fenomena di mana munculnya peluang kerja baru di desa wisata. Munawaroh (2021) berpendapat bahwa kesempatan kerja dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti banyak atau

sedikitnya jumlah pengunjung, jenis usaha, tingkat keterampilan masyarakat, keterlibatan masyarakat desa, dan dukungan pemerintah serta *stakeholder* terkait.

3. Adanya kemitraan, merupakan sebuah kondisi di mana terdapat organisasi atau lembaga yang menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Kemitraan ini dapat membantu dalam koordinasi dan komunikasi, promosi dan pemasaran, pengembangan kapasitas, serta penyelesaian konflik. Dalam hal ini, Fandeli (2017) berpendapat bahwa kemitraan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti kejelasan dalam kemitraan, kemampuan dalam kemitraan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, dan keberlanjutan kemitraan.

Sedangkan, Wijaya (2019) menyatakan bahwa dampak ekonomi dari desa wisata yang dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

1. Pendapatan, dengan adanya desa wisata ini dapat menghasilkan pendapatan bagi negara dan masyarakat melalui berbagai sektor, seperti pajak, retribusi, dan penjualan produk dan jasa.
2. Lapangan kerja, ditetapkannya desa wisata dapat membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal yang nantinya dapat bekerja di sektor pariwisata.
3. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara.
4. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kualitas hidupnya.

Menurut Firmanto (2020) mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi pengelolaan desa wisata bagi masyarakat lokal diantaranya :

1. Melalui diversifikasi usaha yang merupakan strategi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di desa wisata. Diversifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha baru yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan wisatawan, seperti kuliner, kerajinan tangan, jasa transportasi, dan *homestay*;
2. Melakukan pengembangan usaha kreatif untuk meningkatkan daya saing desa wisata dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Usaha kreatif dapat berupa industri kreatif, seni budaya, dan pariwisata berbasis komunitas;
3. Melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan;
4. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) selaku pengelola desa wisata. Pelatihan dapat mencakup materi tentang manajemen organisasi, pemasaran, pelayanan wisatawan, dan pengembangan desa wisata;
5. Melakukan penguatan kelembagaan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata dan memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat lokal. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengurus, penyusunan AD/ART, dan pengembangan jaringan kerjasama; dan

6. Memfasilitasi akses permodalan untuk membantu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mengembangkan usaha masyarakat lokal dan meningkatkan infrastruktur desa wisata. Fasilitasi akses permodalan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, program pemerintah, atau swasta.

2.2.3 Pariwisata

1. Definisi Pariwisata

Pariwisata merupakan “istilah yang diberikan ketika terjadi kejadian saat seorang wisatawan sedang melakukan perjalanan atau mengunjungi tempat tujuan” (Sutrisno, 2008). Pariwisata merupakan “kegiatan bepergian untuk sementara waktu dengan tujuan untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, atau tujuan lainnya, bukan untuk menetap atau mencari nafkah di tempat tujuan” (Meyers, 2009).

Adapun definisi pariwisata yang diatur dengan peraturan resmi di Indonesia adalah:

Pariwisata adalah berbagai jenis kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah kota, dan pemerintah daerah. Dalam pariwisata terdapat kawasan strategi pariwisata yang mempunyai fungsi penting atau potensi bagi pengembangan pariwisata dan mampu mempengaruhi aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. dan makanan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata).

Dalam konteks pariwisata, juga terdapat desa wisata yang merupakan bagian integral dari risiko pengembangan pariwisata. Asumsi tentang manfaat desa wisata terhadap masyarakat adalah :

Melalui desa wisata, pariwisata menunjukkan kesesuaiannya dengan semangat kerja, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan atau lebih rincinya terkait dengan pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja di pedesaan, sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai alat pengentasan kemiskinan (Nyoman Sunarta & Nyoman Sukma A, 2017).

2. Jenis Pariwisata

Adapun pendapat terkait destinasi dan objek wisata adalah :

Sebenarnya destinasi sama halnya dengan objek wisata, destinasi adalah suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang dilalui selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit). Suatu tempat pasti memiliki batas-batas tertentu, baik secara actual maupun hukum. Penggolongan jenis objek wisata akan terlihat dari ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap objek wisata (Pitana & Diarta, 2009).

Objek wisata ini dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis, diantaranya :

- a. Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung, danau, sungai, fauna dan flora, kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam.
- b. Objek wisata budaya, misalnya : kesenian tradisional, pakaian adat, upacara adat, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional.
- c. Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan, hiburan, ketangkasan, taman rekreasi, taman nasional, pusat perbelanjaan.

2.2.4 Pengembangan Ekonomi Lokal

1. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal

Adapun pendapat tentang definisi pengembangan ekonomi lokal adalah :

Pengembangan ekonomi lokal menurut dapat didefinisikan tentang membangun kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, sektor non-pemerintah, dan masyarakat yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada, menstimulasi dan menciptakan perekonomian lokal yang kuat dan berkelanjutan Rahma (2012).

Pengembangan ekonomi lokal merupakan solusi strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi lokal mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan bekerja sama, mereka dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja baru (Munir & Fitanto, 2005).

Pengembangan ekonomi lokal berpusat pada upaya pemerintah daerah dan komunitas dalam mengelola sumber daya lokal. Hal ini dilakukan melalui penataan pekerjaan baru, baik dengan kolaborasi bersama sektor swasta maupun antar komunitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kegiatan ekonomi di wilayah setempat. Pengembangan ekonomi lokal memiliki ciri khas, yaitu mengedepankan "*Endogenous Development*" dimana pendekatan ini fokus pada pemanfaatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan fisik yang ada di daerah setempat, kemudian menciptakan lapangan kerja baru yang berfokus utama membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, serta mendorong kegiatan ekonomi lokal dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah setempat dengan mengoptimalkan potensi lokal (Syakur, 2013).

Dalam definisi pengembangan ekonomi lokal tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang dapat diambil yaitu kerja sama antar semua komponen dan pemanfaatan sumber daya lokal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan strategi penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, dimana dalam hal ini pemerintah daerah bersama-sama mengubah potensi lokal yang dimiliki menjadi kekuatan ekonomi sebagai perbaikan kualitas hidup penduduknya.

2. Sasaran dan Tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal adalah “memaksimalkan potensi daerah, dimana potensi ekonomi daerah mengacu pada kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan” (Suparmoko, 2002).

Asumsi terkait dengan pendekatan pengembangan ekonomi lokal :

Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) memiliki sasaran jangka panjang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, serta daya saing daerah dengan memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan daya saingnya (Rozikin & Haris, 2021).

Rozikin & Haris (2021) berpendapat bahwa tujuan utama pengembangan ekonomi lokal adalah :

- a. Pengurangan kemiskinan secara signifikan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan mengurangi jumlah penduduk miskin;
- b. Peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat lokal dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Syakur (2013) mengatakan bahwa tujuan utama pengembangan ekonomi lokal adalah untuk meningkatkan peluang kerja bagi penduduk setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan jumlah lapangan kerja dengan menciptakan peluang kerja baru di berbagai sektor ekonomi;
- b. Meningkatkan variasi lapangan kerja dengan menyediakan peluang kerja yang beragam dengan berbagai tingkat keterampilan dan pendapatan.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat harus aktif dalam mencapai tujuan pengembangan ekonomi lokal. Mereka tidak bisa hanya bersikap pasif, tetapi harus mengambil inisiatif dan tindakan nyata. Setiap kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus mendukung pengembangan ekonomi lokal. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

bahwa semua pihak harus bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi lokal.

3. Aspek Pengembangan Ekonomi Lokal

Prasetyo & Santoso (2014) menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi lokal dapat diidentifikasi dari beberapa aspek antara lain :

- a. Sumber daya fisik yang meliputi tentang infrastruktur dan teknologinya;
- b. Sumber daya manusia yang meliputi tentang kualitas pendidikan, Kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja;
- c. Ekonomi yang meliputi tentang pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pendapatan masyarakat; serta
- d. Kemitraan yang meliputi tentang kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Blakely (1994) menyatakan bahwa dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

- a. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha;
- b. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;
- c. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran;
- d. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Sedangkan, Meyer-stamer (2004) menyatakan bahwa aspek pengembangan ekonomi lokal terdapat 6 (enam), diantaranya :

- a. Kelompok sasaran pengembangan ekonomi lokal;
- b. Faktor lokasi;
- c. Sinergi;
- d. Pembangunan berkelanjutan yang melihat pada aspek ekonomi, ekologis, sosial;
- e. Tata pemerintahan terdiri dari kemitraan dengan sektor public dan swasta, perampangan regulasi di sektor publik dan pengembangan organisasi;
- f. Manajemen, pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada proses berulang dengan landasan diagnostik dan perencanaan, implementasi, dan *monitoring* serta evaluasi.

Syakur (2013) berpendapat bahwa aspek pengembangan ekonomi lokal berfokus pada upaya pemerintah daerah dan komunitas dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kegiatan ekonomi di wilayah setempat.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan upaya multi-aspek yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Aspek-aspek pengembangan ekonomi lokal yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan komunitas dalam merumuskan strategi dan menjadi tolak ukur pada pelaksanaan atau implementasi program pengembangan ekonomi lokal yang efektif dan berkelanjutan.

4. Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Desa Wisata

Asumsi terkait dengan pendekatan pengembangan ekonomi lokal :

Pendekatan pengembangan ekonomi lokal merupakan sebuah pendekatan holistik dan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai sektor, aktor, dan strategi pembangunan dalam suatu wilayah. Pengembangan ekonomi lokal berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokalnya. Pengembangan ekonomi lokal juga menawarkan berbagai pilihan strategi untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah, seperti pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan promosi pariwisata lokal (Rahma, 2012).

Pengembangan ekonomi lokal di desa wisata dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengembangkan produk wisata, memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas, dan menjalin kerja sama dengan *stakeholder* lain. Seperti halnya pengembangan ekonomi lokal yang dapat dilakukan di Desa Wisata Tepus dengan meningkatkan fasilitas dan atraksi wisata atau melakukan pengembangan paket wisata, seperti penyewaan peralatan pantai atau *camping, banana boat, jet ski*, penginapan dan restoran. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar seperti tanah liat dikembangkan menjadi produk gerabah, tumbuhan sekitar dikembangkan untuk membuat kain batik atau kerajinan tangan, hasil panen ikan dikembangkan untuk membuat olahan makanan, dan terumbu karang yang dikembangkan untuk membuat *souvenir* dengan lebih inovatif dan kreatif. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, desa wisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan didukung dengan perluasan jaringan baik bersama pemerintah maupun non pemerintah.

2.2.5 Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Adapun pendapat tentang definisi kemiskinan adalah :

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami individu atau rumah tangga, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak untuk hidup. Di dalam kemiskinan terdapat keadaan dimana masyarakat mengalami situasi kekurangan akses terhadap sumber daya, aset produktif, dan pendapatan yang mengakibatkan keadaan kekurangan materi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Sedangkan, pendapat tentang definisi kemiskinan berdasarkan dimensi adalah :

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang pangan dan papan, melainkan juga memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia lainnya. Dimensi-dimensi lain seperti kesehatan, pendidikan, keamanan masa depan, dan peran sosial juga terpengaruh oleh kemiskinan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang kemiskinan membutuhkan analisis multidimensional yang mempertimbangkan semua faktor yang saling terkait (Solihin, 2014).

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan permasalahan multidimensi yang dimana dimensi kemiskinan mencakup 4 (empat) unsur utama yaitu kurangnya kesempatan, rendahnya kapasitas, kurangnya keamanan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan juga dikaitkan dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik seseorang, sehingga lambat laun menimbulkan kerentanan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan kesejahteraan, dimana seseorang yang dianggap masuk kedalam kategori miskin biasanya dianggap tidak akan merasakan sejahtera di kehidupannya (Yoserizal, 2015).

Berdasarkan dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena kompleks yang memiliki banyak dimensi dan dampak. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia lainnya seperti kesehatan, pendidikan, keamanan masa depan, dan peran sosial. Kemiskinan disini merupakan masalah kompleks yang membutuhkan suatu solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya penanggulangan kemiskinan harus fokus pada semua dimensi yang

terpengaruh dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan optimal.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Suharto (2009) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan, diantaranya :

- a. Faktor Individu, dimana faktor ini merupakan salah satu determinan utama kemiskinan yang berkaitan dengan aspek patologis, yaitu kondisi fisik dan psikologis individu. Kemiskinan dapat disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan individu dalam menghadapi kebutuhan sehari-hari;
- b. Faktor Sosial, dimana faktor ini merupakan salah satu determinan utama kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak individu dalam kemiskinan. Faktor ini meliputi diskriminasi, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, kurangnya akses terhadap layanan sosial, dan lingkungan yang tidak mendukung;
- c. Faktor Kultural, dimana faktor ini merupakan salah satu determinan utama kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini meliputi nilai-nilai dan norma yang tidak mendukung kemajuan, sikap dan perilaku yang tidak produktif, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.
- d. Faktor Struktural, dimana faktor ini merupakan salah satu determinan utama kemiskinan yang merujuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak mudah diakses. Faktor ini meliputi ketidakadilan ekonomi,

kelemahan sistem pendidikan dan kesehatan, ketidakjelasan hukum dan tata kelola, dan kurangnya infrastruktur.

3. Indikator Kemiskinan Mikro

Terdapat 14 variabel kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2021) yang menyebutkan bahwa :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang;
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan;
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. Hanya mengonsumsi daging/ayam/susu 1 (satu) kali dalam satu minggu;
- i. Hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun;
- j. Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sehari;
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik;
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5Ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan;

- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya SD;
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Pada Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2009 (PPLS-08) dalam Sitepu (2012) menyebutkan bahwa kriteria tersebut menggunakan 13 variabel seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Kriteria Rumah Tangga Miskin

No.	Kriteria	Variabel
1.	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	1) Milik sendiri; 2) Kontrak; 3) Sewa; 4) Bebas Sewa
2.	Luas lantai m ² m ²
3.	Jenis lantai terluas	1) Bukan tanah/bambu; 2) Tanah; 3) Bambu
4.	a) Jenis dinding terluas	1) Tembok; 2) Kayu; 3) Bambu; 4) Lainnya
	b) Jika 4a berkode 1 atau 2, maka kondisi dinding	1) Bagus/kualitas tinggi; 2) Jelek/kualitas rendah
5.	a) Jenis atap terluas	1) Beton; 2) Genteng; 3) Sirap; 4) Seng; 5) Asbes; 6) Ijuk/rumbia; 7) Lainnya
	b) Jika 5a berkode 1,2,3,4, atau 5, maka kondisi atap	1) Bagus/kualitas tinggi; 2) Jelek/kualitas rendah
6.	Sumber air minum	1) Air kemasan bermerek; 2) Air isi ulang; 3) Leding meteran; 4) Leding eceran; 5) Sumur bor/pompa; 6) Sumber terlindungi; 7) Sumber tak terlindungi; 8) Air Sungai; 9) Mata air terlindungi; 10) Air Hujan
7.	Cara memperoleh air minum	1) Membeli; 2) Tidak membeli
8.	a) Sumber penerangan utama	1) Listrik PLN; 2) Listrik non PLN; 3) Petromak/aladin; 4) Pelita/sentir/obor; 5) Lainnya

No.	Kriteria	Variabel
	b) Jika Listrik PLN (R.8a=1), daya terpasang	1) 450 watt; 2) 900 watt; 3) 1.300 watt; 4) 2.200 watt; 5) >2.200 watt; 6) Tanpa meteran
9.	Bahann bakar/energi utama untuk memasak	1) Listrik; 2) Gas/Elpiji; 3) Minyak tanah; 4) Arang/briket; 5) Kayu bakar; 6) Lainnya
10.	Penggunaan fasilitas tempat buang air besar	1) Sendiri; 2) Bersama; 3) Umum; 4) Tidak ada
11.	Tempat pembuangan akhir tinja	1) Tangki/SPAL; 2) Kolam/sawah; 3) Sungai/danau/laut; 4) Lubang tanah; 5) Pantai/tanah lapang/kebun; 6) Lainnya
12.	Apakah rumah tangga memiliki sendiri aset sebagai berikut	1) Mobil; 2) Kapal motor; 3) Perahu motor; 4) Sepeda motor; 5) Sepeda; 6) Perahu; 7) Lemari es; 8) Tabung gas 12kg/lebih; 9) HP
13.	Apakah rumah tangga menjadi peserta program berikut	1) PKH; 2) Beras raskin; 3) Jamkesmas; 4) Asuransi kesehatan lainnya; 5) Jamsostek; 6) KB

Sumber : Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2012

Adapun kategori miskin berdasarkan garis pendapatan perkapita perbulan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tepus (2023) yang menyatakan bahwa :

- a. Ekstrem miskin garis pendapatan sekitar Rp467.492 perkapita per bulan;
- b. Sangat miskin garis pendapatan sekitar Rp467.492 – Rp623.325 perkapita per bulan;
- c. Hampir miskin garis pendapatan sekitar Rp623.326 – Rp809.158 perkapita per bulan;
- d. Tidak miskin garis pendapatan lebih dari Rp1.044.991 perkapita perbulan.

2.2.6 Relevansi Pekerjaan Sosial Pada Kemiskinan

1. Definisi Pekerjaan Sosial Pada Kemiskinan

Adapun pendapat tentang definisi pekerjaan sosial adalah :

Pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional yang membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan atau mencapai kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka dalam mencapai tujuan. Pekerja sosial bekerja dengan orang-orang dari segala usia dan latar belakang, dan mereka mungkin terlibat dalam berbagai kegiatan seperti penyuluhan, terapi, perencanaan kasus, dan advokasi (Zastrow, 2017).

Pekerjaan sosial membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dan membangun kehidupan yang lebih baik. Para pekerja sosial bekerja dengan berbagai pihak untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Sedangkan, menurut (Siporin, 1975) pekerjaan sosial adalah profesi terstruktur dan terlatih yang bertujuan untuk membantu orang lain. Para pekerja sosial memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, serta izin dan kewenangan untuk menjalankan tugasnya secara profesional (National Association Of Social Worker, 1997).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu metoda atau aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dialaminya serta meningkatkan keberfungsian sosialnya dengan tujuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Praktik pekerjaan sosial di bidang kemiskinan meliputi pengembalian dan pengembangan sosial individu ataupun komunitas yang terkategori miskin. Seseorang disebut miskin apabila mereka mengalami disfungsi sosial dikarenakan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani masalah kemiskinan tidak hanya diarahkan individu maupun komunitas saja, melainkan juga ditujukan kepada situasi-situasi sosial yang mempengaruhi kehidupannya. Konsep keberfungsian menjadi acuan bahwa proses praktik pekerjaan sosial di bidang kemiskinan menjadi

pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran, dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh penerima manfaat itu sendiri.

2. Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial Pada Kemiskinan

Pincus & Minahan (1980) dalam bukunya yang berjudul *Social Work Practice* menjelaskan terkait tujuan dari pekerja sosial, diantaranya :

- a. Memperkuat kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi kesulitannya: Membantu mereka menjadi lebih mandiri dan mampu menghadapi berbagai situasi;
- b. Menjembatani individu dengan sistem yang menyediakan sumber daya, layanan, dan peluang: Memastikan mereka mendapatkan akses terhadap bantuan yang dibutuhkan;
- c. Meningkatkan kinerja sistem tersebut agar lebih efektif dan manusiawi: Memperkuat sistem pelayanan sosial untuk mencapai tujuannya secara optimal;
- d. Berkontribusi dalam pengembangan dan kemajuan kebijakan sosial: Mendukung terciptanya kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi semua orang.

National Association Of Social Worker (1997) menjelaskan bahwa tujuan praktik pekerjaan sosial adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan individu, hal ini dengan membantu meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya serta mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya;
- b. Menghubungkan orang dengan sumber daya, hal ini dilakukan dengan membantu mereka dalam mendapatkan akses terhadap layanan dan bantuan yang dibutuhkan serta menjembatani mereka dengan sistem pelayanan sosial;

- c. Meningkatkan kinerja sistem pelayanan sosial, hal ini dilakukan dengan membuat sistem lebih efektif dan efisien serta memastikan sistem bekerja secara manusiawi;
- d. Mengembangkan dan memperbaiki pelayanan sosial, hal ini dilakukan dengan mendukung terciptanya kebijakan sosial yang adil dan bermanfaat serta mendorong inovasi dan pengembangan program-program sosial yang baru.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat mencapai kesejahteraan dengan memperkuat kemampuan mereka, menghubungkan mereka dengan sumber daya, dan mendorong terciptanya sistem sosial yang lebih baik.

3. Peran Pekerja Sosial Pada Kemiskinan

Ife (1995) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) peran utama pekerja sosial, diantaranya :

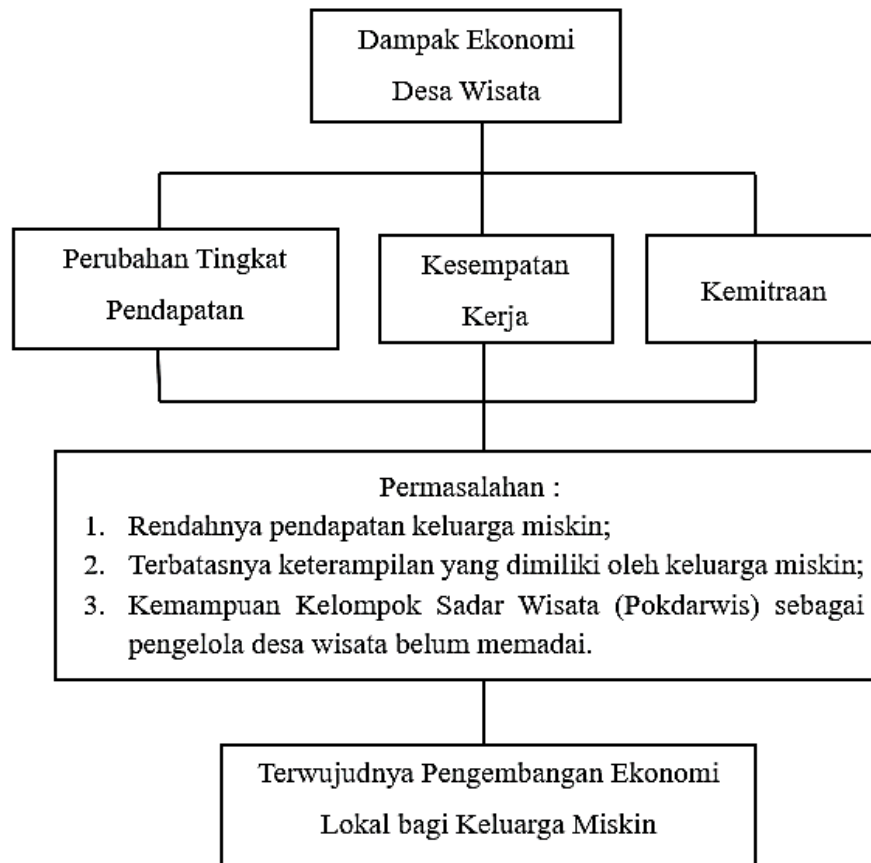
- a. Peranan Fasilitator, dimana peran ini terkelompok untuk membangkitkan semangat dan memberi dorongan-dorongan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Peran ini dapat berupa dukungan untuk memperkuat, mengakui, dan menghargai nilai yang dimiliki yang dapat diberikan melalui dukungan formal dan informal. Dalam peran ini juga meliputi peran mediator dan negosiator. Peran mediator dan negosiator dilakukan dalam rangka memperluas aktivitas kerja sama dengan menguntungkan seluruh pihak yang terlibat. Membangun konsensus dengan sesama pihak untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat.

- b. Peranan Edukator, peran ini meliputi peran dalam pelaksanaan proses peningkatan produktivitas serta proses penentuan agenda. Peningkatan produktivitas individu, kelompok, maupun masyarakat meliputi kegiatan pemberian masukan dan peningkatan keterampilan. Peran educator dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, pemberian informasi, konfrontasi, dan pelatihan-pelatihan.
- c. Peranan Advokator, dalam peran ini sebagai pekerja sosial akan membela hak-hak individu, kelompok, maupun masyarakat dengan memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasarnya. Pada peran ini, pekerja sosial akan menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka dengan memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki suara, serta melindungi mereka dari bahaya dan eksploitasi dengan membantu mereka yang rentan dan tidak berdaya;
- d. Peran Sebagai Agen Perubahan Sosial, dalam peran ini pekerja sosial akan mendorong perubahan sosial dengan memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua orang, melawan penindasan dan diskriminasi dengan membela hak-hak kelompok rentan, serta mempromosikan perubahan kebijakan dengan mendukung kebijakan yang adil dan bermanfaat.

2.2.7 Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui dampak desa wisata dapat dinilai melalui beberapa aspek utama. Dimana, terdapat 3 (tiga) aspek utama terkait dampak ekonomi desa wisata diantaranya : 1) Perubahan Tingkat Pendapatan; 2) Kesempatan Kerja; dan 3) Kemitraan. Berdasarkan analisis ketiga aspek, ditemukan beberapa permasalahan

yang perlu diatasi untuk meningkatkan dampak desa wisata agar terwujudnya pengembangan ekonomi lokal bagi keluarga miskin di Desa Tepus.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Hasil Penelitian 2024